

PERAN KYAI DALAM POLITIK PERADABAN (PENDEKATAN SEMIOTIKA)

Oleh: Kuseni

Abstrak

Kata kunci:

PENDAHULUAN

Menurut saya, kalau ingin menghancurkan peradaban suatu bangsa, maka hancurkanlah bahasanya. Bahasa adalah puncak dari peradaban. Maju dan mundurnya suatu peradaban, tercermin dari tingkat penguasaan bahasa. Dan isi pesan bahasa, secara semiotika mengandung 3 tingkatan; (1). Ibarat, (2). Isyarat, (3) Simbol. Bagaimanakah tingkat penguasaan bangsa kita terhadap makna semiotika?.

Ketika Kyai Ma'ruf Amin berkata bahwa mereka yang tidak melihat kemajuan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah petahana, maka orang itu adalah tuli dan buta. Tidak berselang lama, Kyai Ma'ruf Amin kemudian didemo oleh para tuna rungu dan tuna netra. Ujaran Kyai Ma'ruf Amin dinilai melecehkan mereka. Begitupun kasus "Tampang Boyolali" yang disampaikan Prabowo, sontak menimbulkan gelombang demonstrasi. Ucapan Prabowo dianggap penghinaan.

Sekiranya saya berkata bahwa jalanan di depan UIN Jakarta lumpuh, maka apakah itu berarti menghina mereka yang cacat kakinya lantaran saya menggunakan metafora lumpuh?. Disinilah tingkat kecerdasan suatu bangsa dapat diukur. Jika dengan metafora saja gagal, maka rasanya tak mungkin mereka dapat menangkap semiotika yang bersifat isyarat, apalagi simbol.

Charles Sanders Pierce, mengidentifikasi interpretasi tanda dalam relasi Segitiga Sama Kaki, yaitu: (1). Rheme, interpretasi spontan, (2). Dicient, interpretasi yang telah spesifik, (3). Argument, interpretasi yang telah berdasar. Dalam relasi tersebut, mula-mula masyarakat resah gara-gara ujaran Kyai Ma'ruf ataupun Prabowo. Keresahan yang diekspresikan melalui unjuk rasa, berada pada level Rheme atau Qualisign (sesuatu yang berpotensi jadi tanda). Pada level ini masih bersifat derau/teriakan emosional beberapa pihak.

Oleh beberapa elit politik, tindakan masyarakat justru didukung. Pada level ini, Rheme telah naik dari Rheme menjadi Dicient atau Sinsign (sesuatu yang telah dapat diduga sebagai tanda). Publik pada level ini makin yakin bahwa sumber kegaduhan adalah ujaran dari Kyai Ma'ruf ataupun Prabowo. Namun ketika para akademisi/ilmuwan ikut serta memberikan pembenaran atas sikap masyarakat, maka tindakan akademisi/ilmuwan telah

melegitimasi Dicont/Sinsign menjadi Argument atau Legisign (sesuatu yang telah sah sebagai tanda). Pada level ini, sumber kegaduhan disebabkan oleh ujaran Kyai Ma'ruf dan Prabowo telah mendapatkan tanda bahasa yang argumentatif.

Kegagalan umat menangkap metafora adalah simbol kebodohan. Celaknya kebodohan tersebut justru didukung oleh para elit politik dan akademisi/ilmuwan. Ibarat ikan ketemu air, maka komplit sudah bahwa masyarakat kita adalah bodoh. Dan kebodohan adalah level terendah dalam peradaban suatu bangsa. Pertanyaannya adalah bagaimanakah peran Kyai ditengah-tengah masyarakat yang bodoh dan tidak beradab?.

Kyai dan Politik

Ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia (ekonomi, teknologi, pendidikan, budaya, seni, militer, kesehatan, jiwa, ritual, sejarah, humaniora, dll). Dan seluruh aspek kehidupan manusia yang menyangkut hajat orang banyak, tidak terlepas dari keputusan-keputusan politik. Dalam konteks inilah seorang Kyai wajib berpolitik sebagai bentuk kewajiban dakwah. Pertanyaannya adalah politik yang bagaimanakah? Sebab pada umumnya dunia politik adalah kotor, dan tipu menipu.

Dalam adagium politik "Boleh dusta, tapi tidak boleh salah". Sebaliknya dalam adagium Kyai "Boleh salah, tapi tidak boleh dusta". Seorang politisi, tidak boleh kesalahannya diketahui masyarakat. Begitu kesalahannya diketahui masyarakat, maka karier politiknya tamat. Karena itu demi menjaga kariernya, dusta menjadi pilihan pendekatan. Dalam konteks inilah saya memaknai politik adalah pikiran orang licik tanpa titik, dan orangnya disebut politikus. Poly artinya banyak, Tikus (simbol kelicikan). Politikus berarti Tikus-Tikus. Masuk dunia politik berarti memasuki ranah Tikus yang penuh tipu-menipu.

Kebalikan dari politikus, seorang Kyai yang kesalahannya diketahui masyarakat tidaklah bermasalah, asalkan tidak dusta. Sekali seorang Kyai berdusta, maka tamatlah keyaiannya. Dalam QS.3:104 ditegaskan bahwa kewajiban dakwah ditujukan untuk sebagian orang. Dan yang dimaksud sebagian orang itu tentulah mereka yang mendalami ilmu keislaman. Mereka itulah para ulama. Dan Kyai adalah representasi simbol ulama. Sebagai simbol ulama, Kyai tidak terlepas dari pondok pesantren. Karena itu Zamakhsyari Dhofier (2011, 93) mendefinisikan bahwa Kyai adalah gelar kehormatan kepada seorang ahli keislaman yang memimpin pondok pesantren. Melalui pondok pesantren itulah Kyai melakukan gerakan perubahan sosial: dari masyarakat yang tidak beradab menuju masyarakat yang beradab. Kyai menjadi figur sentral sekaligus kontrol sosial. Dalam konteks inilah sosok Kyai dituntut menjadi lokomotif peradaban dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keteladanan, kemanusiaan dan berkeadilan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kyai yang seharusnya menjadi kontrol sosial justru menjadi pelaku politik praktis?.

Kyai Sebagai Wasit

Dalam teori semiotika, terdapat relasi Segitiga Sama Kaki; (1). Ikon, tanda kemiripan, (2). Indeks, tanda yang menunjuk, (3). Simbol, tanda sebagai kesepakatan. Hal yang tidak bisa dilepaskan dari diri Ma'ruf Amin adalah bahwa dirinya adalah Kyai. Ma'ruf Amin telah menjadi "Ikon" bagi Ulama'. Dan hal itu diperkuat dengan "Indeks" merujuk kenyataan bahwa dirinya adalah Ketua Majelis Ulama' Indonesia/MUI. Sebagai Ketua Majelis Ulama' Indonesia, maka mesti bertutur/bersikap/bertindak adil dalam menghukumi permasalahan. Karena Kyai Ma'ruf Amin telah menjadi "Simbol" hakim layaknya seorang Wasit.

Menurut saya, sesuatu menjadi "masalah" adalah ketika praktik tidak sesuai teorinya. Ketika seharusnya (das sollen) berbeda dengan kenyataannya (das sein). Antara normativitas dengan fakta tidak terdapat kesesuaian, maka saat itulah timbul permasalahan. Begitupun dengan kedudukan Ma'ruf Amin sebagai Kyai maju sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. Pertanyaannya adalah dimanakah permasalahannya?.

1. Tidak Berani Melepas Baju.

Ketika Kyai Ma'ruf maju sebagai calon Wakil Presiden, maka sejak itu pula harusnya berani menanggalkan Indeks-nya sebagai Ketua MUI, sehingga kedudukannya tidak lagi sebagai Ikon 'Ulama. Cukup Ma'ruf Amin sebagai Kyai. Sebab kalau jabatan Ketua MUI-nya tidak ditanggalkan, maka bakalan menimbulkan ketidakadilan. Ibarat seorang Wasit, terlibat pula ikut bermain dalam pertandingan bola. Contoh kasus, jika ada umat yang bertanya pada Kyai Ma'ruf: Siapakah calon terbaik yang mesti dipilih dalam Pilpres 2019 nanti ? Beranikah Kyai Ma'ruf menjawab bahwa calon terbaik pada Pilpres mendatang adalah Prabowo-Sandi ? Sebab kalau beliau menjawab bahwa Joko-Ma'ruf-lah yang terbaik, maka bisakah dijamin kepastiannya bahwa jawaban tersebut tidak bias kepentingan pribadi ? Majunya Kyai Ma'ruf Amin menjadi calon Wakil Presiden tanpa berani melepas jabatan Ketua MUI hakekatnya adalah penghinaan terhadap nalar sehat.

Cuti atau non aktif sebagai Ketua MUI selama kampanye Pilpres tidaklah cukup. Justru yang demikian itu menunjukkan kepribadian yang tercela. Menurut Ibn Miskawaih bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang tengah-tengah. Hal itu dilandaskan pada isyarat QS.2:143 "Dan Kami jadikan kamu umat yang tengah-tengah". Atas dasar ayat tersebut, Ibn Miskawaih menarik rumusan bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan tengah tengah-tengah.

Orang yang banyak pertimbangan sehingga tidak berani bersikap disebut Pengecut. Orang yang berani bersikap tanpa pertimbangan disebut Sembrono. Keberanian adalah sikap pertengahan antara Pengecut dengan Sembrono. Keberanian adalah sikap utama yang wajib dimiliki seorang berderajat 'Ulama. Dan Kyai Ma'ruf tidak memiliki keberanian melepas jabatan Ketua MUI. Kyai Ma'ruf kalah dengan Sandiaga Uno yang berani melepas jabatan Wakil Gubernur. Harusnya Kyai Ma'ruf memberikan contoh yang baik bagi umat, bukan sebaliknya. Dalam konteks inilah kegigihan Kyai Ma'ruf

menggangkangi jabatan Ketua MUI dapat ditafsirkan sebagai bentuk kerakusan (kemaruk) terhadap kekuasaan. Benar kata Michel Foucault bahwa melawan kekuasaan adalah melawan lupa. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa Kyai Ma'ruf telah lupa diri.

Imam Al-Ghazali berkata "Yadrî Wa Yadrî Annahu Lâ Yadrî" (Orang yang pintar, tapi dirinya tidak menyadari kepintarannya". Menurut Al-Ghazali, model orang seperti itu tergolong orang yang lalai. Dan karenanya ia tergolong orang yang celaka. Supaya tidak celaka, maka orang yang lalai itu harus diingatkan. Dan tulisan ini adalah bentuk kecintaan saya pada Sang Kyai. Sesama Kyai sudah semestinya saling nasehat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

2. Tidak Berkedudukan sebagai Subyek.

Ibn.Taimiyah dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah memberikan pertanyaan: Pilih mana antara orang yang shaleh dan rajin ibadah sebagai pemimpin, tapi dia lemah dalam kepemimpinan atau pilih orang yang tidak shaleh juga tidak rajin ibadah, tetapi terampil dan kuat dalam hal kepemimpinan ? Jika pertanyaan tersebut ditanyakan pada komunitas Pesantren, Jamaah Pengajian, Majelis Taklim atau komunitas-komunitas lainnya yang berbasis pada keshalehan agama, maka sudah pasti bakalan menjawab pilihan model yang pertama. Sebaliknya jika pertanyaan tersebut di atas ditanyakan pada komunitas model "Islam Abangan", maka mereka akan menjawab pilihan model kedua.

Ibn Taimiyah menawarkan jawaban bahwa semua itu tergantung kondisi. Lalu Ibn Taimiyah menyodorkan Utsman bin Affan. Beliau adalah Sahabat Nabi sekaligus Menantu Nabi SAW. Tak ada satupun muslim di dunia ini yang meragukan keshalehannya, tetapi justru saat beliau dipercaya sebagai Kepala Negara: keadaan jadi kacau-balau. Beliau Shaleh secara individu, tetapi lemah dalam kepemimpinan. Akibatnya negara hancur. Kepemimpinan adalah soal duniawi. Dan menyangkut dunia, Nabi SAW bersabda "Antum A'lamu Biamri Dunyâkum" (Urusan dunia, kamulah yang lebih mengetahui) HR Muslim. Begitupun dalam Pilihan Presiden 2019 ini. Baik dan tidak baik, benar dan tidak benar ukurannya bukanlah "Kyai atau tidak Kyai" yang maju menjadi kandidat, tetapi saat ini Indonesia butuh kepemimpinan orang yang kuat.

Buya M. Natsir dan Gusdur. Keduanya adalah Kyai dan sama-sama terjun di dunia politik praktis. Buya M. Natsir pernah jadi Ketua Umum Partai Masyumi dan Perdana Menteri di jaman Orde Lama. Adapun Gusdur pernah sebagai Ketua Umum PKB dan Presiden RI. Keduanya adalah sosok ulama yang kuat dan penentu kebijakan negara. Sebaliknya Kyai Ma'ruf, tidak pernah menampakkan bahwa dirinya adalah orang yang kuat dalam hal kepemimpinan, padahal Indonesia butuh kepemimpinan yang kuat. Dalam konteks inilah kiranya keberadaan Kyai Ma'ruf maju menjadi kandidat Wakil Presiden tak ubahnya sebagai simbol semata. Kyai Ma'ruf keberadaannya bukan sebagai Subyek, tetapi sebagai Obyek.

Menyangkut Obyek, Pierce dalam teori semiotikanya berpendapat bahwa terdapat relasi Segitika Sama Kaki: (1). Representament, sesuatu yang

merepresentasikan, (2). Obyek, sesuatu yang dipresentasikan, (3). Interpretant, interpretasi tentang makna. Mengacu pada teori tersebut, yang menjadi Representamen ialah Kyai Ma'ruf. Keberadaan Kyai Ma'ruf mempresentasikan umat Islam yang shaleh dan 'alim merefer ke realitas atau konsep (Obyek). Obyeknya adalah yang dipresentasikan yakni Wakil Presiden. Dengan diberikannya jabatan Wakil Presiden kepada Kyai Ma'ruf, maka secara semiotik dapat ditarik tafsiran bahwa Jokowi sangat pro pada umat Islam. Mengapa pesan yang demikian itu sangat penting dibuat dan dikirimkan oleh Jokowi kepada umat Islam ? Karena selama ini Jokowi selalu di-fram-kan/dikesankan sebagai anti umat Islam, sehingga untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah anti umat Islam, maka dipungutlah Kyai Ma'ruf yang notabene Ketua Umum MUI. Dengan demikian berakhir sudah pencitraan Jokowi sebagai anti umat Islam. Jika hal itu menjadi faktor utama sebagai pertimbangan Jokowi mengangkat Kyai Ma;ruf sebagai Wakil Presiden, maka tidak berlebihan jika kehadiran Kyai Ma'ruf hanya sebatas Simbol (obyek, bukan subyek). Model penafsiran semacam itu, dalam semiotika Segitiga Sama Kaki sebagaimana tersebut di atas dinamakan ranah *Interpretant*.

PENUTUP: Stop Politisasi Agama.

Terbunuhnya khalifah 'Utsmân ibn 'Affân, menimbulkan perang Shiffin (Perang Saudara sesama muslim dan sesama sahabat Nabi). Dalam perang tersebut, pasukan Mu'âwiyah terdesak dan nyaris kalah. Mereka minta damai. Ajakan tersebut disambut positif oleh 'Alî ibn Abî Thâlib. Guna menjajaki seberapa jauh bentuk perdamaian yang dimaksud, kedua kubu mengirimkan juru runding. Dari pihak 'Alî ibn Abî Thâlib diwakilkan Musa Al-Asy'ârî. Sedangkan dari pihak Mu'âwiyah diwakilkan 'Amr ibn Ash. Keduanya lalu berunding. Pokok utama pembicaraan mereka ialah mencari tahu penyebab terjadinya perang Shiffin, dan solusinya. Setelah lama mereka berdiskusi, tercapailah satu pemahaman bersama bahwa penyebab utama terjadinya perang Shiffin adalah rebutan kekuasaan. Menurut keduanya, solusinya ialah mencabut kekuasaan 'Alî ibn Abî Thâlib dan Mu'âwiyah. Selanjutnya diadakan pemilihan ulang. Bagi yang memperoleh dukungan terbanyak, dialah yang ditetapkan sebagai khalifah.

Musa Al-Asy'ârî pun menyampaikan substansi pokok masalahnya berikut solusinya, yaitu mencabut kekuasaan ke-khalifah-an: 'Alî ibn Abî Thâlib. Saat tiba gilirannya 'Amr bin Ash untuk bicara di muka umum, mendadak ia mengkhianati perjanjian. Secara sepihak mendadak mengumumkan penetapan Mu'âwiyah sebagai Khalifah. Kontan saja suasana menjadi tegang kembali. Kubu 'Alî ibn Abî Thâlib merasa ditipu dan dikhianati kubu Mu'âwiyah. Reaksi kubu 'Alî ibn Abî Thâlib terbelah menjadi 4 golongan:

(1) Khawârij. Kelompok ini beranggapan bahwa Mu'âwiyah telah kafir karena berkhianat. Dan menurut Khawârij, berdamai dengan orang kafir hukumnya haram, pelakunya digolongkan sebagai kafir pula. Dalam konteks ilmu politik, sikap mereka dapat diidentifikasi sebagai golput (golongan putih) beraliran ekstrem. (2) Ahl al-Sunnah. Kelompok ini dimotori oleh 'Abdullâh ibn 'Umâr (putra 'Umâr ibn Khatthâb). Mereka tidak

mau memihak 'Alî ibn Abî Thâlib ataupun Mu'âwiyah. Mereka tidak mau berurusan dengan politik yang penuh subhat (antara dosa dan tidak). Mereka lebih tertarik menghidup-hidupkan Sunnah Nabî (dakwah) di masjid. Dalam konteks ilmu politik, sikap mereka dapat diidentifikasi sebagai golput (golongan putih) beraliran moderat. (3). Ahl al-Shuffah. Sama seperti halnya dengan golongan Ahl al-Sunnah, mereka tak mau terlibat urusan politik/duniawi yang dinilainya penuh dosa. Hanya saja golongan Ahl al-Shuffah tidak mau hidup di kota. Mereka menyingkir dari keramaian, dan khususy (konsentrasi) pada upaya penyucian jiwa. Dalam terminologi ilmu politik, sikap mereka dapat dikategorikan sebagai golput (golongan putih) beraliran egoisme. (4). Syi'ah. Kelompok yang tetap setia menyokong khalîfah 'Alî ibn Abî Thâlib.

Bertitik tolak dari pemaparan tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pemahaman bahwa timbulnya perpecahan sehingga menjadi aliran-aliran dalam Islâm lebih disebabkan oleh persoalan-persoalan politik yang ditarik ke ranah agama. Persoalan rebutan jabatan: siapakah yang sah dan layak jadi pemimpin adalah murni urusan dunia, tetapi mendadak ditarik ke ranah keimanan (kafir dan tidak kafir). Bagi Siapa saja yang mendukung kepemimpinan 'Alî ibn Abî Thâlib maupun Mu'âwiyah, oleh kelompok Khawârij dianggap kafir. Lain halnya dengan kelompok Syi'ah, siapa saja yang tidak mendukung kepemimpinan 'Alî ibn Abî Thâlib dinilainya sebagai iman yang tidak sempurna. Lain pula pandangan kelompok Ahl al-Sunnah, menurutnya kelompok Syi'ah dinilai berlebihan dalam memandang kepemimpinan 'Alî ibn Abî Thâlib, sehingga mereka cenderung sesat dalam beragama.

Situasi saling menghujat antara sesama muslim sebagaimana gambaran di atas, bukankah yang demikian itu sekarang sedang terjadi ? Umat dibentur-benturkan oleh para elit agamawan untuk saling bermusuhan. Umat dilarang memilih calon dari "Kampret", dan wajib mendukung calon "Kecebong" ataupun begitu sebaliknya. Agama boleh sama, tetapi ketika beda partai, maka beda kepentingan. Akibatnya ketika agama dibingkai dalam wacana politik, maka yang muncul adalah perpecahan karena intrik-intrik rebutan kekuasaan. Politik adalah pikiran orang licik tanpa titik. Demi mendapatkan kekuasaan, segala cara dilakukan. Memplintir-plintir ayat. Memfitnah dan membunuh karakter lawan. Dan perpecahan umat Islâm untuk yang kali pertama di dunia, juga disebabkan oleh persoalan politik (rebutan jabatan ke-khalîfah-an).

Memilih Jokowi-Kyai Ma'ruf tidaklah haram. Memilih Prabowo-Sandi juga tidak wajib. Persoalan rebutan jabatan, jangan pernah ditarik-tarik ke wilayah agama. Kedua kubu pasangan calon Presiden dan Wakilnya, sama-sama didukung ulama dan Kyai. Jika tidak bijak dalam menyikapi perbedaan, perang saudara ada di depan mata. Karena itu mari Berbhineka Tunggal Ika: saling asah, asih dan asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2013. Relasi Islam dan Politik. Yogyakarta: LkiS
- Abdul Munir Mulkhan. 1990. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Rozak, dkk . 2006. Ilmu kalam. Bandung: CV. Pustaka setia
- Ahmad Mahmud Shubhi. 2001. Filsafat Etika (Al-Falsafah al-Akhlâqiyah fi al-Fikr al-Islâmî: al-'Aqliyyûn wa al-Dzauqiyûn). Terjemahan Yunan Azkaruzzaman Ahmad. Jakarta: Serambi.
- Azzumardi Azra. 2003. Surau. Jakarta: Logos
- Bahtiar Effendi. 2005. Jalan tengah Politik Islam. Jakarta: Ushul Press
- Greg Fealy. 2003. Ulama and Politic. Yogyakarta: LkiS
- Harun Nasution. 2006. Teologi Islam. Jakarta: UI Press
- J. Schmandt, Henry. 2002. A History of Political Philosophy. USA: The Bruce Publishing Company
- Marsel Danesi. 2010. Pengantar Memahami Semiotika. Yogyakarta: Media Jalasutra
- Nurcholish Madjid. 1992. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina.
-, (1997). Kaki Langit Peradaban Islam. Jakarta: Paramadina.
- Zamakhshari Dhofier. 2011. Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES